



Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp. (0274)
367509 ext 830, 832, 833, 834,
Website: pmk.bantulkab.go.id Email: dpmk@bantulkab.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310) ;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan Perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul

Tanggal : 17 Februari 2025

 Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul 



Dra. Sri Nuryanti, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
196707101993032008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Sekretaris Daerah Kab. Bantul;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Kalurahan Kabupaten Bantul
Nomor : 08 Tahun 2025
Tanggal : 17 Februari 2025
TENTANG :
PERUBAHAN KEPUTUSAN
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/
JASA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

PERSONALIA DAN NAMA SUB KEGIATAN

NO	NAMA	SUB KEGIATAN
1.	DEWANTORO, S.Tr.IP Pembina Muda, III/a NIP. 199812312021081002 Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan	1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		2. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
		3. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
		4. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		6. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		7. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		8. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
		9. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
		10. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		11. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		12. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		13. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		14. Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
		15. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		16. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

NO	NAMA	SUB KEGIATAN
		17. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		18. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		19. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		20. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
		21. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		22. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		23. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		24. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		25. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		26. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		27. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		30. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan

Bantul, 17 Februari 2025

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 



Dra. Sri Nuryanti, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196707101993032008